

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori agensi biasanya dijadikan teori dasar penelitian dalam penelitian pengungkapan *Sustainability Report*. Teori ini menggambarkan kaitan antara agen dan prinsipal. Hubungan agensi dijelaskan oleh (Meckling (1976) yaitu:

“Agency relationship as a contact under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Pernyataan itu menguraikan kaitan antara pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal terhadap pihak lain, yaitu manager yang bertindak sebagai agen. Agen diharuskan untuk bertindak sebagai prinsipal yang terlibat penyerahan kewenangan kepada agen dalam pengambilan keputusan bisnis. Prinsipal yang merupakan penyalur modal dalam bentuk dana dan fasilitas dalam pelaksanaan operasional badan usaha, sementara itu agen memiliki kewajiban dalam menata manajemen perusahaan. Agen juga diwajibkan menyediakan laporan secara teratur setiap bulan kepada prinsipal mengenai usaha yang telah terlaksana. Laporan tersebut digunakan prinsipal untuk memberikan penilaian kinerja agen (Himmawati (2014).





Menurut (Empiris et al., (2012), hubungan antara manajemen dan investor menimbulkan dua permasalahan, yaitu *information problem* dan *agency problem*.

Hal ini yang menjadi penyebab fungsi laporan keuangan dan tahunan semakin meningkat. *Information problem* biasa disebut dengan *asymmetri information* dimana terdapat ketidaksesuaian informasi antara manajemen dengan investor sehingga muncul permasalahan antara kedua pihak. *Agency problem* adalah resiko yang muncul dari tidak berperan aktifnya investor dalam pengelolaan perusahaan.

Menurut Hapsari (2011) teori agensi membahas penyelesaian dua masalah yang biasa terjadi pada hubungan keagenan. Masalah keagenan pertama muncul ketika terdapat perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen serta prinsipal sulit untuk memastikan yang terjadi sebenarnya pada agen. Masalah keagenan kedua muncul ketika prinsipal dan agen terdapat penanganan yang berbeda dalam menghadapi resiko yang muncul.

Berdasarkan penjelasan itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu teori keagenan membahas mengenai kepentingan masing-masing individu namun individu memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam operasional perusahaan. Teori agensi erat kaitannya dengan dampak pencemaran pada perusahaan. Manager berperan dalam mengupayakan dampak-dampak bisnis agar organisasi dapat berlanjut. Pada titik top management, harus dibuktikan dengan pernyataan misi perusahaan berupa strategi wujud komitmen perusahaan. Misi perbankan pada umumnya adalah memansiasiakan layanan keuangan dengan sebaik mungkin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Stakeholder



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(Freeman & David, 1983) mengemukakan bahwa teori *stakeholder* terdapat kelompok lain yang menjadi tanggung jawab organisasi selain pemegang saham, yaitu kelompok-kelompok yang berkaitan dengan tindakan organisasi. *Stakeholder* seringkali diidentifikasi dengan suatu ketentuan seperti yang diungkapkan oleh Freeman (1984) bahwa dari segi kekuatan dan kepentingan yang relatif *stakeholder* terhadap suatu ide/pikiran, (Istikomah (2014) dari segi posisi serta pengaruh yang dimiliki oleh *stakeholder*. (Orts & Strudler, 2002) menyebutkan teori *stakeholder* memperluas kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi dalam suatu badan usaha terdiri dari pemilik non ekuitas termasuk karyawan, berbagai jenis kreditor dan lain-lain.

Menurut Fitria (2013) terdapat dua bentuk pendekatan *stakeholder*, antara lain yang pertama adalah *old-corporate relation* dan kedua adalah *new-corporate relation*. *Old-corporate relation* membahas gambaran keberlangsungan kegiatan badan usaha yang melakukan kegiatannya sendiri dengan tidak adanya kesatuan dengan fungsi lainnya dalam perusahaan. Konflik yang mungkin terjadi adalah konflik *internal*, yaitu tuntutan dari karyawan mengenai perbaikan kesejahteraan dan konflik *eksternal*, yaitu tekanan dari masyarakat akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan berupa pembuangan limbah yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar untuk perusahaan jika dilaporkan ke pihak berwajib. *New-corporate relation* mewajibkan kerja sama antara perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya sehingga tidak bekerja sendiri dalam sosial masyarakat karena kesempurnaan adalah target dalam hubungan ini. Pendekatan *new-corporate*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



relation menghilangkan kesenjangan sosial antara *stakeholders* perusahaan seperti yang ada pada *old-corporate relation*.

Teori *stakeholder* menyetujui bahwa akan ada saat dimana kepentingan saling berbenturan tetapi tetap berpendapat bahwa manajemen harus berusaha dengan itikad baik untuk menyeimbangkan kepentingan *stakeholder* secara adil daripada secara rutin menempatkannya untuk kepentingan pemegang saham Metcalfe (1998). Demikian *stakeholder* dikategorikan menjadi *primary stakeholders* yang merupakan anggota yang sangat memengaruhi keperluan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung segala akibat, yakni investor, kreditur, karyawan, pemasok, saluran pemasaran, dan pelanggan serta *secondary stakeholders* dimana anggota tidak berpengaruh secara penting terhadap ekonomi perusahaan, misalnya masyarakat umum, lembaga sosial masyarakat, media, dan serikat buruh (Maulana (2010)).

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa teori *stakeholder* menjelaskan mengenai hubungan kerjasama dalam melakukan operasional perusahaan dan menghilangkan adanya kesenjangan sosial antar individu. Teori *stakeholder* erat kaitannya dengan dampak perusahaan adalah berdiskusi mengenai dampak terhadap *stakeholder* yang akan dijadikan topik-topik materialitas. Topik-topik materialitas yang biasa dibahas adalah privasi pelanggan serta pelatihan dan pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Teori Legitimasi

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Teori legitimasi adalah teori yang diterapkan oleh perusahaan yang terus berusaha menjamin bahwa aktivitas bisnis mereka berjalan seiring dengan batas dan norma masyarakat masing-masing yang tidak tetap tetapi berubah (Brown, Noel and Deegan : 2012). Artinya ada “kontak sosial” antara organisasi dan mereka yang terpengaruh oleh aktivitas bisnis organisasi. Teori legitimasi fokus terhadap interaksi perusahaan dengan masyarakat (Susanto & Tarigan (2011).

Manisa & Defung (2018) teori legitimasi memastikan bahwa perusahaan melakukan operasional menurut norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, perusahaan memeriksa kembali agar aktivitas mereka dapat diterima dimanapun baik pihak dalam negeri dan pihak luar negeri. Apabila perusahaan melakukan operasional berdasarkan peraturan yang berada di masyarakat, perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan mendapat “status” dalam masyarakat.

Menurut Ayub (2018) teori legitimasi menjelaskan mengenai pengungkapan lingkungan secara sukarela oleh organisasi untuk mendapatkan legitimasi (pengungkapan) dari masyarakat sekitar dan memaksimalkan kekuatan uangnya dalam jangka panjang. Menurut Ayub (2018) untuk mendapatkan legitimasi dapat melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan substantif dan simbolik. Pendekatan substantif, yaitu perubahan konkret tindakan perusahaan dalam menyesuaikan strategi perusahaan dengan norma masyarakat. Pendekatan simbolik, yaitu melakukan praktik bisnis untuk memengaruhi persepsi pemangku kepentingan tanpa perlu melakukan perubahan nyata sehingga pemangku kepentingan menganggap bahwa perusahaan telah komitmen untuk memenuhi harapan sosial.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan itu bisa disimpulkan bahwa operasional perusahaan

wajib berdasarkan pada nilai sosial yang sama dengan nilai masyarakat. Legitimasi perusahaan berada pada kondisi terburuk pada saat nilai-nilai yang berada pada perusahaan berbeda dengan masyarakat atau biasa disebut dengan dengan *legitimacy gaps*. Menurut Wartick & Mahon (1994) dalam buku yang berjudul *Towards a Substantive Definition of the Corporate Issue Construct: A Review and Synthesis of the Literature* menjelaskan tiga alasan terjadinya *legitimacy gaps*, yaitu:

- a. Kinerja perusahaan berubah namun ekspektasi masyarakat atas kinerja perusahaan tetap sama.
- b. Ekspektasi masyarakat tentang tata kelola perusahaan berubah tetapi tata kelola perusahaan tidak berubah atau sama.
- c. Kinerja perusahaan serta ekspektasi masyarakat terhadap tata kelola perusahaan berevolusi tetapi keduanya bergerak ke arah yang sama dengan hubungan timbal/jeda.

Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya *legitimacy maps* dengan cara mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan, salah satunya dengan menyusun laporan keberlanjutan. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan dalam pemenuhannya terhadap peraturan pemerintah dan *stakeholders*. Perusahaan melakukan pengungkapan sesuai dengan GRI *Standards* dan aturan (*legitimate*) yang melingkupinya, hal ini bukan karena tekanan namun karena pemahaman dan kesadaran bahwa laba bukan satu-satunya hal penting dalam jangka pendek.

4. Teori Sinyal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Ratnasari (2017) teori sinyal adalah sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk menjadi bahan pertimbangan apakah investor akan menanam saham pada perusahaan itu atau tidak. Teori sinyal memusatkan perhatian terhadap perubahan perilaku informasi dan pengaruh informasi. Sinyal digunakan untuk mengurangi informasi asimetri yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain (Spence, 2002). Untuk mengurangi informasi asimetri, perusahaan sebagai pengirim dapat secara proaktif mempublikasikan *sustainability report* sebagai sinyal kepada pihak terkait diantaranya pelanggan, pemasok, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya sebagai penerima. Setelah menerima sinyal, *stakeholder* dapat berasumsi bahwa perusahaan berjalan dengan baik dan berkomitmen terhadap masalah keberlanjutan (Gray et al., (2009).

Menurut Fitria (2013) informasi yang dipublikasikan merupakan dasar bagi investor dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dianalisis bisa dijadikan sinyal baik (*good news*) dan sinyal buruk (*bad news*). Teori sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Penghargaan Indonesia *Sustainability Reporting Award* (ISRA) merupakan media yang bisa menolong kegiatan musyawarah dan menyampaikan laporan selain laporan keuangan. Penghargaan yang diterima dapat memberikan kepada investor mengenai perusahaan dan investor dapat mengetahui keputusan apa yang dapat diambil. Keputusan investor dapat berupa harga saham yang diukur melalui *return* saham atau *abnormalreturn* dan volume perdagangan.

Teori sinyal erat kaitannya dengan dampak perusahaan adalah mengungkapkan informasi yang dibutuhkan stakeholder. Isu materialitas yang biasa dibahas adalah privasi pelanggan serta pelatihan dan pendidikan maka materialitas tersebut merupakan prioritas yang harus diutamakan dalam memenuhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



misi perusahaan. Teori sinyal dapat disimbolkan dengan laporan keuangan sebagai sinyal pertama dan *sustainability report* sebagai sinyal kedua dimana perusahaan peduli terhadap lingkungan sosial dan informasi pada laporan berkelanjutan bisa dipahami pengguna sebagai tanda menurunnya ketidakpastian masa depan dalam jangka panjang. Jadi pengguna tidak hanya melihat laba dalam laporan keuangan demi perspektif jangka pendek. *Sustainability report* melengkapi laporan keuangan dimana apabila tingkat kepatuhan *sustainability report* rendah maka sinyal kurang baik yang berarti perusahaan masih belum sadar dan belum paham.

B. Tinjauan Konsep

1. *Global Reporting Initiative (GRI)*

Menurut Kurniawati (2017) *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah organisasi internasional yang berada di Amsterdam, Belanda dengan kegiatan inti yang berfokus pada pengembangan standar pengungkapan *sustainability report* sebagai pencapaian pelaporan perusahaan. GRI didirikan oleh organisasi yang berada di Amerika Serikat, yaitu *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* serta *Tellus Institute* dibantu dorongan *United Nations Environment Programme (UNEP)* pada tahun 1997. Sekretariat pusat berada di Amsterdam, Belanda dengan memiliki fungsi sebagai penyalur koordinasi kegiatan operasional GRI. GRI mempunyai kantor cabang di Australia, Brazil, Cina, India, serta Amerika Serikat. Relasi umum terdiri dari 600 lebih *stakeholders* perusahaan serta relasi utama sebanyak 30.000 anggota sebagai wakil dari berbagai konstitusi dan sektor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut *Global Reporting Initiative*, *sustainability report* didefinisikan

sebagai berikut: (C) suatu bentuk implementasi pengungkapan tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholders* tentang aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI wajib mencakup prinsip pelaporan dalam GRI-G4, yaitu keseimbangan, akurat, dapat dibandingkan, kesesuaian, urut waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Tusiayati (2019) negara yang sudah meratifikasi *Global Reporting Initiative (GRI)* sebagai berikut:

- a. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
- b. Thailand
- c. Eropa dan Jepang

Menurut Wulolo & Rahmawati (2017) GRI G4 merupakan standar baru yang dikeluarkan pada 22 Mei 2013 di Amsterdam. G4 menjelaskan perubahan yang signifikan. Perubahan pertama adalah isu-isu material, yaitu hubungan antara dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan organisasi dengan pengaruh pada pertimbangan serta ketetapan *stakeholders*. Perubahan kedua adalah menghapus tingkat standar pada GRI sebelumnya (GRI G3.1). Perubahan kedua ini menggambarkan bentuk tanggapan dari para ahli terhadap penggunaan level aplikasi yang menimbulkan kejanggalan untuk beberapa organisasi. Perubahan ketiga adalah perluasan batas-batas pelaporan, dimana setiap pelopor harus membahas kinerja berkelanjutan dari rantai pasokan hingga rantai pasar. Perubahan keempat adalah berpusat pada etika dan tata kelola, dimana G4 akan menguraikan mengenai fungsi organisasi pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



GRI G4 memiliki dua standar pengungkapan, yaitu standar umum dan standar khusus. Terdapat tujuh aspek pengungkapan standar umum, yaitu profil perusahaan, strategi dan analisis, aspek material, dan *boundary* teridentifikasi, hubungan dengan *stakeholder*, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas (Ladina et al. (2016). Pengungkapan standar khusus dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ekonomi, lingkungan, serta sosial (Ladina et al. (2016).

2. Konsep Paradigma

Pada mulanya perusahaan dibentuk dengan konsep *single P (Profit)* dengan tujuan menghasilkan laba yang tinggi tanpa memperhitungkan dampak yang timbul. Sekarang telah berubah menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Hal yang memengaruhi konsep bisnis *single P* berubah menjadi *triple P*, yaitu memenuhi keperluan hidup masa sekarang tanpa mengganggu rencana masa depan dalam mencukupi kebutuhan mereka dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial (Dhaniel Syam (2013).

Konsep dunia usaha yang berubah dari *profit oriented only* menjadi *Triple-P Bottom Line* tersebut adalah cara manajemen untuk mencapai *sustainability development* melalui kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keuntungan (*profit*), bumi (*planet*), dan komunitas (*people*) (WIDIANTO, 2011). Berkembangnya berita *sustainability development* dikarenakan banyaknya kerusakan alam dan perubahan iklim. Hal ini yang membuat masyarakat ingat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam serta menggunakannya dengan seefisien mungkin dikarenakan jumlahnya yang terbatas.



Menurut Guler Aras (2009) dalam buku *Global Perspectives on Corporate*

Governance and CSR mengemukakan teori mengenai *Single P*. Dua pendekatan untuk CSR telah diidentifikasi berdasarkan pendekatan mereka orientasi. Ini adalah Eropa Kontinental dan Anglo-Amerika pendekatan. Pendekatan Eropa Kontinental diyakini berorientasi pada pemangku kepentingan. Paradigma dapat ditemukan dalam beberapa karya sebagai tiga paradigma berbeda tetapi telah mengadopsi paradigma tunggal pendekatan karena kesamaan yang dimiliki oleh ketiganya. Di negara yang menggunakan lini model, pasar keuangan hampir tidak berkembang, dibandingkan dengan negara yang menggunakan model Anglo-Amerika. Partisipasi ekuitas tersebar luas, lintas dan terkonsentrasi, dengan kontrol tingkat tinggi oleh lembaga keuangan pada umumnya, dan bank pada khususnya.

Menurut Guler Aras (2009) dalam buku *Global Perspectives on Corporate Governance and CSR* mengemukakan teori mengenai *Triple Bottom Line*. Organisasi US secara tradisional mengungkapkan perilaku lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) melalui laporan tahunan mereka. Beberapa bisnis mengeluarkan laporan keberlanjutan terpisah yang secara eksklusif menangani pengungkapan ESG. Ada banyak jenis laporan yang melaporkan masalah non-keuangan, yaitu:

- a. Laporan karbon.
- b. Laporan perubahan iklim.
- c. Laporan lingkungan.
- d. Laporan terintegrasi.
- e. Laporan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Laporan keberlanjutan.
- g. Laporan *Triple Bottom Line*.
- h. Dan lain-lain.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian yang relevan menunjukkan bahwa ada tiga teori utama untuk melaporkan praktik LST, yaitu:

- a. Untuk mengelola persepsi pemangku kepentingan utama, yaitu teori signal (Ferijani (2018)).
- b. Untuk menyampaikan nilai-nilai organisasi kepada publik, yaitu teori manajemen (Neu et al., 1998).
- c. Untuk menetapkan bahwa kegiatan organisasi sejalan dengan norma sosial, yaitu teori legitimasi (Raharjo (2015)).

Terdapat permintaan yang meningkat untuk informasi non keuangan oleh pemangku kepentingan (Ersalina (2019)).

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menggambarkan pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Definisi lain dari pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan yang ada pada waktu sekarang tanpa mengorbankan waktu mendatang untuk memenuhi keperluan (Jaya (2004)). Perusahaan yang berhasil menggapai *sustainability development* memerlukan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sesuatu aturan dengan bahasa dan tujuan yang jelas dan mudah dipahami (Sinta Listani (2016).

Menurut laporan Putu Wulandari Tristananda (2018) pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini dengan tidak mengorbankan kemampuan kebutuhan yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

“...development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Menurut Susiana (2015) dalam buku Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan menjelaskan pembangunan berkelanjutan memiliki aspek penting, yaitu penekanan proses partisipatif. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya diartikan sebagai strategi yang berasal dari pembuat kebijakan, namun menekankan peran penting masyarakat. Oleh karena itu, bagian penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah menyertakan beragam *stakeholders* dalam menentukana apa yang dapat dilakukan dan bagaimana langkahnya.

Tujuan dari *sustainability development* adalah menyeimbangkan antara perkembangan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan. Dua komponen ini saling memengaruhi. *Sustainability development* tergapai apabila perusahaan sudah menerapkan *triple bottom line*. Hal ini bisa diartikan sebagai keperluan jangka panjang *versus* jangka pendek (Lolowang (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Sustainability Report

Menurut *Association of Chartered Certified Accountants* keberlanjutan mencakup seluruh operasi perusahaan dimana seluruh unit perusahaan harus berkepemilikan agar keberlanjutan terlihat. Büyüközkan and Karabulut menunjukkan bahwa ilmu keberlanjutan melampaui daya saing menuju pemahaman keberlanjutan yang lebih holistik, terintegrasi, dan metodologis. Eva & Dewi (2015) menjelaskan bahwa *sustainability reporting* merupakan laporan yang berkonsep pada *sustainable development*. *Sustainability Reporting Guidelines* menyatakan laporan keberlanjutan disusun untuk mengukur, mengungkapkan dan memperlihatkan usaha menjadi perusahaan yang bertanggung jawab bagi seluruh *stakeholders* perusahaan untuk mencapai *sustainability development*.

Menurut Fitriyah (2019) *sustainability report* adalah laporan yang tidak hanya memuat informasi tentang aktivitas keuangan tetapi juga informasi mengenai aktivitas sosial dan lingkungan yang membolehkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan. *Sustainability report* biasa dianggap persamaan dengan sebutan lain misalnya *triple bottom line report*. Sebutan itu pertama kali diperkenalkan oleh Elkington (1997) melalui bukunya "*Cannibals with forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Melalui buku ini, Elkington menggambarkan perusahaan berkelanjutan wajib menerapkan 3P. Bukan hanya menghasilkan laba (*profit*), perusahaan juga wajib memperhatikan ketenteraman masyarakat (*people*), serta memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*).

Sustainability report akan menjadi sarana untuk menghasilkan laporan mengenai ekonomi, sosial serta lingkungan. *Sustainability report* merupakan laporan yang berdiri sendiri serta hal ini harus diluruskan karena banyak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



menganggap bahwa *sustainability report* diungkapkan bersama dengan laporan tahunan (Sejati & Prastiwi (2015). Adanya harapan pelaksanaan pengungkapan yang terbuka menjadi tuntutan bagi perusahaan untuk mempublikasikan informasi *sustainability report* yang dimiliki. Hal ini yang menjadikan *sustainability report* sebagai kunci komunikasi bagi para manager dalam menjalankan aktivitasnya (Morier, 1907).

5. Prinsip-Prinsip Pelaporan *Sustainability Report*

Menurut (GSSB (2016) perusahaan diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan dikarenakan prinsip-prinsip ini bersifat mendasar untuk memperoleh laporan berkelanjutan yang bersifat sempurna. Prinsip-prinsip pelaporan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan

Prinsip ini bertujuan menolong perusahaan dalam menentukan isi laporan yang ditulis dalam laporan. Berikut komponen prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan:

a) Inklusivitas pemangku kepentingan

Badan usaha wajib mengetahui para pemangku kepentingannya dan menerangkan cara perusahaan menjawab keinginan dan harapan dari para pemangku kepentingan.

b) Konteks keberlanjutan

Laporan wajib menjelaskan perilaku perusahaan dalam konsep keberlanjutan yang lebih luas.

c) Materialitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Laporan wajib berisikan topik-topik berikut:

- (i) Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan pada perusahaan.
- (ii) Memengaruhi keputusan dan penilaian para pemangku kepentingan secara inti.

d) Kelengkapan

Laporan wajib menjelaskan topik-topik dan batasan material yang cukup untuk menggambarkan risiko ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta membantu para *stakeholders* memberikan penilaian pada periode pelaporan.

b. Prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan

Prinsip ini berfungsi membantu memeriksa keunggulan informasi yang tertuang dalam laporan berkelanjutan. Kualitas informasi ini penting untuk membantu para pemangku kepentingan memberikan penilaian kepada perusahaan dan memperoleh keputusan yang benar. Komponen prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan sebagai berikut:

a) Akurasi

Informasi yang dilaporkan wajib benar serta jelas agar pemangku kepentingan bisa memberikan penilaian perilaku perusahaan.

b) Keseimbangan

Informasi yang dilaporkan wajib menjelaskan dampak baik dan buruk dari perilaku perusahaan untuk menjadi dasar penilaian.

c) Kejelasan

Perusahaan wajib menyampaikan informasi melalui cara yang dapat dimengerti serta dijalankan oleh para pemangku kepentingan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d) Keterbandingan

Perusahaan wajib memilih, menyusun, dan melaporkan yang disuguhkan melalui cara yang baik untuk para pemangku kepentingan dapat menganalisis perilaku perusahaan dan bisa mendukung analisis relatif perusahaan lainnya.

e) Keandalan

Perusahaan harus mengumpulkan, menganalisis, serta melaporkan informasi dan proses dalam persiapan laporan.

f) Ketepatan waktu

Perusahaan harus melapor secara rutin dan tepat waktu sehingga para pemangku kepentingan dapat segera mengambil keputusan.

6. Pengungkapan Sustainability Report

Berdasarkan konsep, pengungkapan adalah bagian penting dari laporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan dapat diartikan sebagai bagian akhir dalam laporan, yakni menyajikan informasi dalam bentuk *financial statement*. Menurut Pawan (2013) pengungkapan adalah, “*Disclosure means supplying information in the financial statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements. It does not extend to public or private statements by made management or information provided outside the financial statement.*”

Pengungkapan *sustainability report* bersifat sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu badan usaha mengungkapkan dengan tulus dan tidak ada tekanan tertentu. Pelaporan *sustainability report* belum memiliki peraturan baku sehingga cara pengungkapannya mengikuti kebijakan manajemen perusahaan. Hal ini yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyebabkan keragaman yang besar dalam pengungkapan informasi sosial pada laporan tahunan masing-masing (Kamaludin (2017)).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 1998) paragraf sembilan menjelaskan, “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting.” (Soelistyoningrum, 2011).

Melalui penjelasan tersebut, perusahaan bisa mengungkapkan seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan serta sosial perusahaan. Pernyataan itu disampaikan melalui Laporan Nilai Tambah (*Value Added Statement*). Hal ini dipertegas dalam penjelasan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 (1), yaitu “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

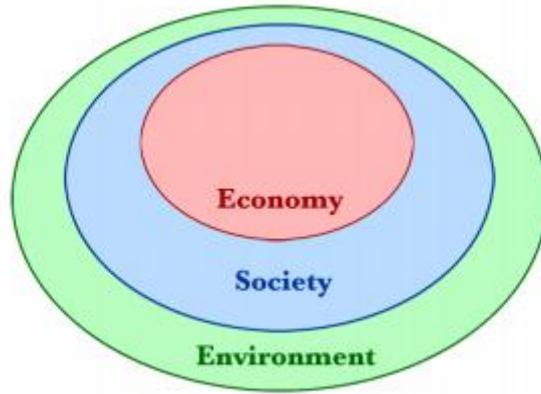
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Skema Deskripsi *Sustainability*



Dalam *sustainability development* terdapat isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Sustainability development* akan tercapai apabila ketiga komponen tersebut terlaksana (WIDIANTO, 2011). Menurut (Tarr & O'Connor (2014) dalam buku yang berjudul *GRI-G4 Financial Services Sector Disclosures*, pengungkapan standar dalam *sustainability report* sesuai dengan *GRI-G4 Financial Services* terdiri dari:

a. Ekonomi

Kategori ekonomi menjelaskan elemen strategi yang terkait dengan tujuan bisnis untuk investasi masyarakat di setiap jenis investasi masyarakat, manfaat yang dimaksudkan untuk penerima dan bisnis, hasil yang diinginkan atau diharapkan dari kegiatan investasi masyarakat, bagaimana kegiatan investasi masyarakat diidentifikasi dan dikelola, dan bagaimana kinerja dan nilai uang.

b. Lingkungan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Kategori lingkungan menjelaskan dampak yang dihasilkan dari pencemaran lingkungan (efek gas rumah kaca dan pembuangan limbah) terhadap ekosistem makhluk hidup.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c.

Sosial sub kategori praktek ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak

Kategori ini menjelaskan kebijakan dan praktik perusahaan mengenai ancaman dan kekerasan di tempat untuk membantu anggota tenaga kerja yang mungkin terjadi.

d.

Sosial sub kategori hak asasi manusia

Kategori ini menjelaskan aset yang dikelola dilaporkan di bawah FS11 jika memiliki layar yang secara eksplisit memasukkan klausul hak asasi manusia. Kebijakan dan prosedur untuk secara eksplisit menangani hak asasi manusia tercakup dalam:

- (i) Kebijakan dengan organisasi lingkungan dan sosial tertentu yang dipraktikkan ke garis bisnis (sebelumnya FS1).
- (ii) Prosedur penilaian dan penyaringan lingkungan dan risiko sosial di lini bisnis (sebelumnya FS2).
- (iii) Proses pemantauan klien dalam pelaksanaan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan juga sosial termasuk dalam transaksi atau perjanjian (sebelumnya FS3).

e.

Sosial sub kategori masyarakat

Kategori ini menjelaskan layanan keuangan yang harus dapat diakses secara wajar oleh semua pelanggan di wilayah di mana lembaga keuangan beroperasi. Tidak adanya layanan keuangan dapat mengakibatkan berkurangnya modal tersedia untuk wilayah, kelompok, atau individu untuk didukung pertumbuhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ekonomi. Akses modal yang sama untuk semua segmen komunitas atau masyarakat juga penting dari perspektif menjaga keseimbangan sosial.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Sosial sub tanggung jawab produk

Sub kategori ini dibagi menjadi 2, yaitu:

- (i) Kebijakan untuk rancangan yang adil dan penjualan produk serta layanan keuangan (sebelumnya FS15)

Indikator ini menjelaskan identifikasi bagaimana pelaporan organisasi mengelola potensi konflik kepentingan antara FI dan pelanggaran. Selain itu juga mengidentifikasi bagaimana institusi mendorong penggunaan produk, layanan, dan saran secara adil dan cara yang wajar, serta memastikan pemasaran yang bertanggung jawab dan menjual ke segmen berisiko lebih tinggi.

- (ii) Inisiatif dalam meningkatkan literasi keuangan menurut jenis penerima manfaat (sebelumnya FS16)

Indikator ini menjelaskan literasi keuangan yang tidak memadai dapat mengakibatkan manajemen yang buruk oleh individu dan organisasi dari sumber keuangan mereka dan penggunaan produk dan layanan yang tidak tepat. Bagi lembaga keuangan, meningkatkan literasi keuangan merupakan kesempatan untuk meningkatkan kecanggihan pelanggan, dasar kemampuannya untuk menggunakan produk dan layanan dan untuk mengatasi masalah hutang berlebih, pengucilan sosial, dan risiko keuangan lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Penelitian Terdahulu

Wulolo & Rahmawati (2017) meneliti tentang kerangka *sustainability report* dengan menganalisis pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan *Global Reporting Initiative G4*. Metode yang dipakai untuk melakukan penelitian ini adalah statistik deskriptif. Hasil dari penelitian Wulolo & Rahmawati (2017) adalah kuantitas dalam pengungkapan CSR menunjukkan terdapat 32 perusahaan yang telah banyak mengungkapkan seluruh kriteria dari aspek profil organisasi, strategi dan analisis. Namun banyak perusahaan tidak melakukan pengungkapan dalam aspek material serta *boundary*, hubungan dengan *stakeholder*, aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Atmajaya (2015) melakukan analisis mengenai penerapan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan. Metode yang dipakai dalam proses analisis ini adalah pedekatan kualitatif dan kuantitatif (analisis deskriptif). Hasil dari penelitian ini adalah PT. ANTAM (persero) Tbk, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Timah (Persero) Tbk, dan PT. Vale Indonesia Tbk sudah mengungkapkan seluruh indikator GRI 3.1.

Muhammadinah (2016) menganalisis kelengkapan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Indeks *Global Reporting Initiative (GRI)* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian analisis deskriptif untuk proses analisis. Hasil dari penelitian ini adalah pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI pada Bank Umum Syariah di Indonesia belum lengkap dikarenakan terdapat beberapa komponen yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan perbankan khususnya perbankan syariah.



Rofelawaty (2014) menganalisis praktik pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Peneliti melakukan analisis menggunakan metode *content analysis*. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan bidang industri yang tercatat di BEI sebagian besar tidak melaksanakan *Sustainability Report* secara penuh dikarenakan beberapa komponen yang seharusnya harus diungkapkan sesuai *Sustainability Reporting Guidelines* kepada *stakeholders* dalam laporan tahunan perusahaan tidak diungkapkan oleh perusahaan.

Maroza (2016) menganalisis pengungkapan *sustainability report* pada PT. Aneka Tambang, Tbk dan PT. Vale Indonesia, Tbk tahun 2013-2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Aneka Tambang mengungkapkan 48 komponen (52,75%) tahun 2013 dan 46 komponen (50,55%) tahun 2014. PT. Vale Indonesia mengungkapkan 29 komponen (31,87%) tahun 2013 dan 34 komponen (37,37%) tahun 2014.

Apriani (2016) menganalisis pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengungkapan terbanyak indikator kinerja ekonomi, lingkungan, serta sosial yang tercatat dalam *sustainability report* pada sampel perusahaan di Industri perkebunan yaitu PT. Astra Agro Lestari adalah sebesar 45 Komponen Indikator pada tahun 2013 (56,96%) sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 46 (58,23%) Komponen Indikator. Berbeda dengan Astra Agro Lestari, PT Bakrie Sumatera Plantations sebesar 31 Komponen Indikator pada tahun 2013 (39,24%) serta pada tahun 2014 sebanyak 24 (30,38%) Komponen Indikator dari 79 Komponen Indikator GRI G3 Guidelines.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gunawan & Meiden (2021) menganalisis kepatuhan *sustainability report*

PT. Aneka Tambang, Tbk. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Aneka Tambang, Tbk telah mengungkapkan *sustainability report* sesuai dengan GRI *Standards*, AA1000AP (2018), dan AA1000AS (2008).

D. Kerangka Pemikiran

Manager bertanggung jawab mengungkapkan dampak-dampak positif dan negatif perusahaan kepada *stakeholder*. Pengungkapan yang dilakukan harus memenuhi kriteria standar GRI 2016. Pelaksana yang akan membantu manager adalah bagian CSRS yang berada pada badan korporat sekretariat perusahaan. Pengungkapan berdasarkan GRI 2016 diharapkan informasi mengenai dampak bagi *stakeholder* menjadi terpenuhi. Manager tidak hanya menyusun laporan keuangan, tetapi juga bertanggung jawab mengungkapkan laporan berkelanjutan sebagai sinyal tanggung jawab kepada *stakeholder*. Dengan adanya pengungkapan dampak dalam bentuk *sustainability report* membuat *stakeholder* dapat mengambil keputusan berdasarkan laporan yang ada sehingga perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat menjadi *legitimate*. Manajemen mengungkapkan informasi pada *sustainability report* berdasarkan GRI *Standards* dan GRI-G4 serta aturan lain yang relevan dan dilaksanakan dengan pemahaman dan kesadaran bukan karena tekanan. Demi mengurangi kesalahan informasi, manajer yang selalu berada dalam perusahaan mengungkapkan dampak-dampak yang terjadi dikarenakan kegiatan bisnis perusahaan kepada *stakeholders* berbentuk *sustainability report*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

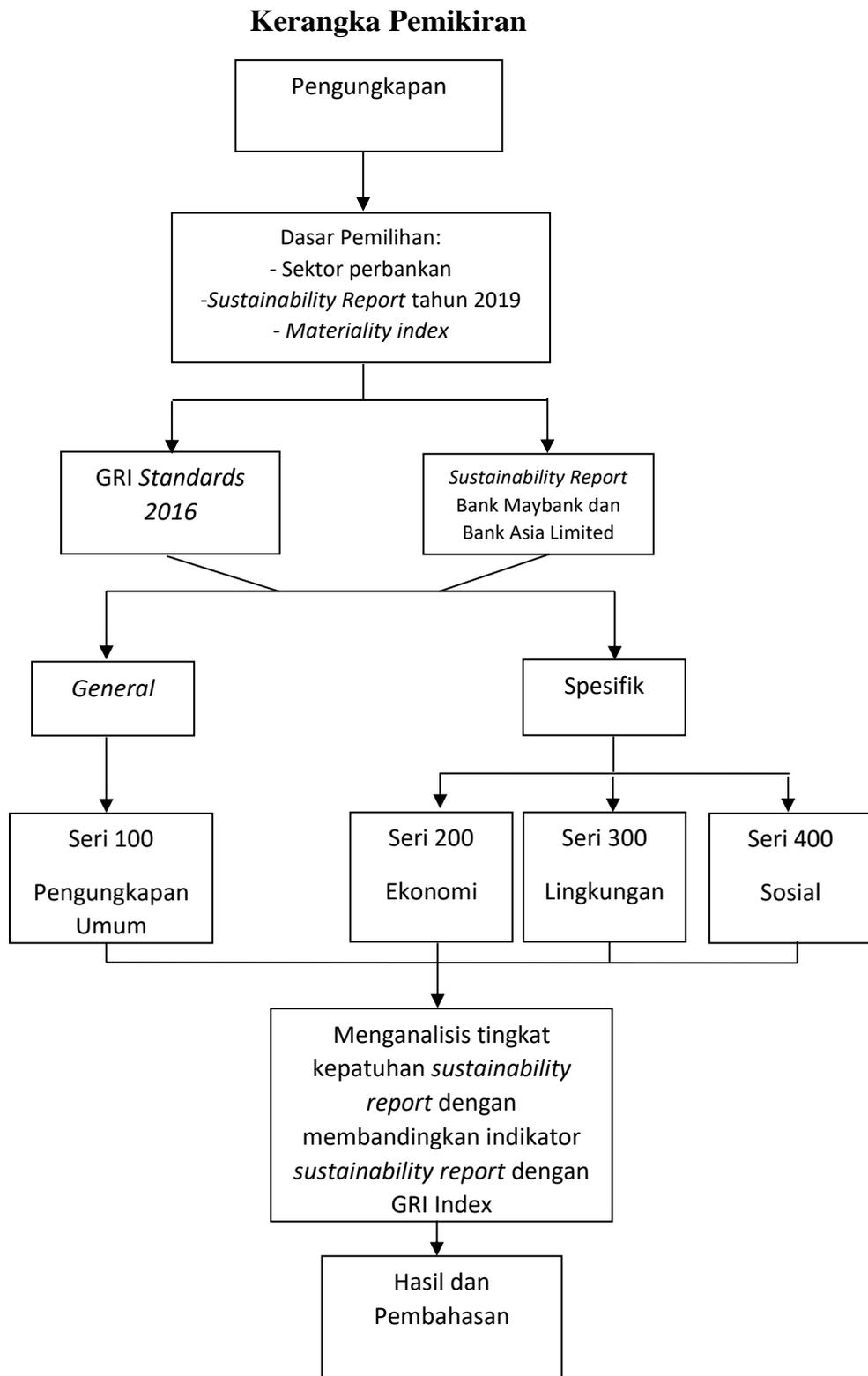
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.2



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.